

**Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan
HAM Kep. Bangka Belitung
Catatan Atas Laporan Keuangan**

**Untuk Periode Tahunan Tahun Anggaran 2020
Berakhir 31 Desember 2020**

**Ditjen Pemasyarakatan
(05) UAPPA-W
AUDITED**

Jl. Pulau Bangka Komp. Perkantoran Gubernur
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Air Itam-Pangkalpinang
Telp. (0717) 439435-439439. Fax (0717)439435

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kep. Bangka Belitung (05) adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Hukum dan HAM RI yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kep. Bangka Belitung (Ditjen Pemasyarakatan) Semester II Tahun Anggaran 2020 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/ pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kep. Bangka Belitung (Div.Pemasyarakatan). Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pangkalpinang, 29 Januari 2020
Kepala Kantor Wilayah

ANAS SAEPUL ANWAR
NIP. 19620219 198603 1 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	5
I. Laporan Realisasi Anggaran	7
II. Neraca	8
III. Laporan Operasional	9
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	10
V. Catatan atas Laporan Keuangan	
Penjelasan Umum	11
Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	23
Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	30
Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	36
Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	41
Pengungkapan Penting Lainnya	44

**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DITJEN PEMASYARAKATAN (649003)**

Jl. Pulau Bangka Komp. Perkantoran Gubernur Pemerintah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung Air Itam-Pangkalpinang
Telp. (0717) 439435-439439. Fax (0717)439435

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Penggabungan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kep. Bangka Belitung (DITJEN PEMASYARAKATAN) tingkat wilayah selaku UAPPA-W yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Periode Tahunan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing-masing Satuan Kerja merupakan tanggungjawab UAKPA.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi serta kinerja keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.



Pangkalpinang, 29 Januari 2020
Kepala Kantor Wilayah

[Handwritten Signature]
ANAS SAEPUL ANWAR
NIP. 19620219 198603 1 002

Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kep. Bangka Belitung Tahun 2020 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2020 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp85.749.797 atau mencapai 1106 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp7.750.000.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2020 adalah sebesar Rp54.811.514.457 atau mencapai 98 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp55.753.849.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2020. Nilai Aset per 31 Desember 2020 dicatat dan disajikan sebesar Rp233.401.316.372 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp524.732.249; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp232.868.787.582; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp7.796.541.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp351.766.949 dan Rp233.049.549.423.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2020 adalah

sebesar Rp85.749.745, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp61.423.766.554 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp61.338.016.809. Surplus dari Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp38.801.230 dan Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp61.299.215.579.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2020 adalah sebesar Rp235.797.146.748 ditambah Defisit-LO sebesar Rp61.299.215.579 kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp678.982.879 dan Transaksi Antar Entitas senilai Rp56.975.905.734 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2020 adalah senilai Rp233.049.549.423.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2020 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEP.BANGKA BELITUNG
(DITJEN PEMASYARAKATAN)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2020 DAN 2019**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2020		% thd Angg	REALISASI 2019
		ANGGARAN	REALISASI		
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	7.750.000	85.749.797	1106,45	24.389.855
JUMLAH PENDAPATAN		7.750.000	85.749.797	1106,45	24.389.855
BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	27.638.541.000	27.308.808.508	98,81	26.923.922.802
Belanja Barang	B.4	28.114.308.000	27.501.705.949	97,82	25.083.679.728
Belanja Modal	B.5	1.000.000	1.000.000	100,00	28.000.000
JUMLAH BELANJA		55.753.849.000	54.811.514.457	98,31	52.035.602.530

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEP.BANGKA BELITUNG (DITJEN PAS) NERACA

PER 31 Desember 2020 DAN 2019 *(Dalam Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	2020	2019
ASET			
ASET LANCAR			
Persediaan	C.1	524.732.249	1.081.294.983
Jumlah Aset Lancar		524.732.249	1.081.294.983
ASET TETAP			
Tanah	C.2	161.087.895.000	155.671.598.000
Peralatan dan Mesin	C.3	24.589.374.120	23.414.924.000
Gedung dan Bangunan	C.4	73.534.953.071	77.937.450.071
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.5	57.134.000	104.534.000
Aset Tetap Lainnya	C.6	45.143.245	45.143.245
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.7	(26.445.711.854)	(22.007.055.700)
Jumlah Aset Tetap		232.868.787.582	235.166.593.616
ASET LAINNYA			
Aset Lain-Lain	C.8	1.166.130.632	466.978.429
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.9	(1.158.334.091)	(463.630.097)
Jumlah Aset Lainnya		7.796.541	3.348.332
JUMLAH ASET		233.401.316.372	236.251.236.931
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.10	351.766.949	454.090.183
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		351.766.949	581.477.410
JUMLAH KEWAJIBAN		351.766.949	454.090.183
EKUITAS			
Ekuitas	C.11	233.049.549.423	235.797.146.748
JUMLAH EKUITAS		233.049.549.423	235.797.146.748
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		233.401.316.372	236.251.236.931

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

**KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEP.BANGKA BELITUNG
(DITJEN PAS)
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2020 DAN 2019**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2020	2019
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	85.749.745	23.116.729
JUMLAH PENDAPATAN		85.749.745	23.116.729
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	27.313.462.508	26.930.469.802
Beban Persediaan	D.3	3.021.852.997	1.152.044.678
Beban Barang dan Jasa	D.4	22.385.536.460	21.676.950.117
Beban Pemeliharaan	D.5	1.627.499.689	1.476.751.798
Beban Perjalanan Dinas	D.6	1.528.825.600	1.209.774.436
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	5.546.589.300	5.156.342.168
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10		
JUMLAH BEBAN		61.423.766.554	57.602.332.999
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(61.338.016.809)	(57.579.216.270)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus Penjualan Aset Nonlancar	D.11	-	575.000
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		-	-
Defisit Selisih Kurs		-	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		42.434.552	32.204.719
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		3.633.322	57.007.435
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		38.801.230	(24.227.716)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(61.299.215.579)	(57.603.443.986)
POS LUAR BIASA	D.12	-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(61.299.215.579)	(57.603.443.986)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEP.BANGKA BELITUNG****(DITJEN PAS)
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2020 DAN 2019***(Dalam Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	2020	2019
EKUITAS AWAL	E.1	235.797.146.748	203.413.237.984
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(61.299.215.579)	(57.603.443.986)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	1.575.712.520	33.976.680.107
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	E.3.1	5.560.000	(201.335.738)
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.2	3.830.407.919	30.509.377.000
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.3	(2.260.255.399)	3.668.638.845
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	56.975.905.734	56.010.672.643
KENAIKAN /PENURUNAN EKUITAS	E.5	(2.747.597.325)	32.383.908.764
EKUITAS AKHIR	E.6	233.049.549.423	235.797.146.748

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kep. Bangka Belitung

*Dasar
Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis*

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor 28 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia R.I. , Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kep. Bangka Belitung adalah Instansi Vertikal Kementerian Hukum dan HAM yang berkedudukan di Propinsi Kep. Bangka Belitung yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Hukum dan HAM. R.I. Entitas berkedudukan di Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu, Jalan Pulau Bangka Air Itam Pangkapinang- Bangka Belitung.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kep. Bangka Belitung Ditjen Pemasarakatan berkomitmen dengan visi **“Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum.”** Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa misi sebagai berikut:

- Mewujudkan Peraturan Perundang-undangan yang berkualitas.
- Mewujudkan Pelayanan Hukum yang berkualitas.
- Mewujudkan Penegakan Hukum yang berkualitas.
- Mewujudkan Penghormatan, pemenuhan, dan Perlindungan HAM.
- Mewujudkan Layanan Manajemen Administrasi Kementerian Hukum dan HAM.
- Mewujudkan Aparatur Kementerian Hukum dan HAM Yang Profesional dan Berintegritas.

Adapun Tata Nilai Kementerian Hukum dan HAM Kep. Bangka Belitung yaitu “PASTI” :

- Profesional
- Akuntabel
- Sinergi
- Transparan
- Inovatif

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2020 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kep. Bangka Belitung. Laporan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kep. Bangka Belitung Tahun 2020 ini merupakan laporan konsolidasi dari seluruh jenjang struktural di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kep. Bangka Belitung yang meliputi wilayah serta satuan kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan.

Jumlah satuan kerja di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kep. Bangka Belitung adalah 10 satuan kerja. Rincian satuan kerja tersebut tersaji sebagai berikut:

Rekapitulasi Jumlah Satker UAPPA-W

No	Kode Wil	Satker	Jumlah/Jenis Kewenangan				Jumlah Satker
			KP	KD	DK	TP	
1	3000	Divpas Babel	-	1	-	-	1
2	3000	Lapas kelas IIA Pangkalpinang	-	1	-	-	1
3	3000	Lapas kelas IIB Sungailiat	-	1	-	-	1

4	3000	Lapas Kelas IIB Tanjungpandan	-	1	-	-	1
5	3000	Rumah Tahanan Kelas IIB Muntok	-	1	-	-	1
6	3000	Bapas Kelas II Pangkalpinang	-	1	-	-	1
7	3000	Rupbasan Kelas II Pangkalpinang	-	1	-	-	1
8	3000	Lapas Narkotika kelas II pangkalpinang	-	1	-	-	1
9	3000	LPKA Kelas II Pangkalpinang	-	1	-	-	1
10	3000	Lapas Perempuan Kelas III Pangkalpinang	-	1	-	-	1
Jumlah			-	10	-	-	10

*Basis
Akuntansi*

A.3. Basis Akuntansi

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kep. Bangka Belitung menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kep. Bangka Belitung dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2020 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kep. Bangka Belitung. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor

Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kep. Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-
LRA*

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-
LO*

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kep. Bangka Belitung adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Sewa Rumah Dinas diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

Aset

aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Aset Lancar yaitu kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:

- harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari dari Rp1.000.000 (satu juta ribu rupiah)
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset

Lainnya.

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

*Penyusutan
Aset Tetap*

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No.90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat

Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

*Aset
Lainnya*

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas

dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2018 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa

masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan satker di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kep. Bangka Belitung telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal, pagu awal Sebesar Rp57.383.987.000 setelah revisi terakhir menjadi sebesar Rp55.753.849.000. Sehingga pagu Anggaran terlihat sebagai berikut ini:

Anggaran Awal dan Revisi Anggaran Tahun 2020

Uraian	2020	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
PNBP	7.750.000	7.750.000
Jumlah Pendapatan	7.750.000	7.750.000
Belanja		
Belanja Pegawai	27.638.541.000	27.638.541.000
Belanja Barang	29.745.446.000	28.114.308.000
Belanja Modal	0	1.000.000
Jumlah Belanja	57.383.987.000	55.753.849.000

Revisi tersebut antara lain berupa pengurangan belanja barang sebesar Rp1.630.138.000 dan penambahan pagu belanja modal sebesar Rp1.000.000. Selain itu, satker di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kep. Bangka Belitung juga telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dalam rangka refocusing penanganan Pandemi Covid-19. Berikut daftar rincian Refocussing anggaran dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19 di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung:

**Daftar Refocussing Anggaran Dalam Rangka Penanganan
Pandemi Covid-19**

SATKER	Program/ Kegiatan	Jenis Belanja	Pagu Awal	Jumlah Realokasi Anggaran	Akun Covid
LPKA Pangkal Pinang	08/5252	522151	Rp 1.080.000	Rp 1.000.000	521841
	08/5253	523111	Rp 92.520.000	Rp 10.419.000	521131
	08/5254	523111	Rp 92.520.000	Rp 5.000.000	521841
TOTAL			Rp 186.120.000	Rp 16.419.000	
Lapas Kelas IIA Pangkalpinang	5252.005.001	521811	Rp 41.150.000	Rp 38.600.000	521131
				Rp 2.550.000	523114
TOTAL			Rp 41.150.000	Rp 41.150.000	
Lapas Kelas IIB Tanjungpandan	052 Layanan Kesehatan	521219	Rp 1.150.000	Rp 1.150.000	521131
		521811	Rp 5.500.000	Rp 5.500.000	521841
	002 Operasional Pemeliharaan Kantor	521811	Rp 9.420.000	Rp 9.420.000	521841
		524111	Rp 2.395.000	Rp 2.395.000	522192
TOTAL			Rp 18.465.000	Rp 18.465.000	
Rutan Kelas IIB Muntok	5.252.005.052	521219	Rp 14.160.000	Rp 1.000.000	532119
TOTAL			Rp 14.160.000	Rp 1.000.000	
Lapas Perempuan Kelas III Pangkal Pinang	5252.994.002	521119	Rp 2.974.000	Rp 2.974.000	521131
		521811	Rp 680.000	Rp 680.000	521841
	5252.005.001	521811	Rp 4.740.000	Rp 4.740.000	521841
TOTAL			Rp 8.394.000	Rp 8.394.000	
Lapas Kelas IIB Sungailiat	5252.005/ Layanan Kesehatan	521219	Rp 23.760.000	Rp 23.760.000	521131
	5252.005/ Layanan Kesehatan	522151	Rp 14.256.000	Rp 3.200.000	521841
	5252.005/ Layanan Kesehatan	521811	Rp 42.768.000	Rp 27.160.000	523114
TOTAL			Rp 80.784.000	Rp 54.120.000	
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM (649003)	08/5252/03	524111	Rp 3.690.000	Rp 3.690.000	522192
	08/5252/03	524111	Rp 47.040.000	Rp 47.040.000	521841
	08/5252/016	521211	Rp 8.000.000	Rp 8.000.000	521841
TOTAL			Rp 58.730.000	Rp 58.730.000	
BALAI PEMASYARAKATAN PANGKAL PINANG	Layanan Dukungan Manajemen Satker	521119	Rp 17.600.000	Rp 13.550.000	521131
				Rp 4.050.000	521841
TOTAL			Rp 17.600.000	Rp 17.600.000	
Rupbasan Pangkalpinang	Penanganan Covid 19	521113	Rp 1.920.000	Rp 10.220.000	521131
		521219	Rp 8.300.000	Rp 7.350.000	521841
TOTAL			Rp 10.220.000	Rp 17.570.000	
Lapas Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang	5252.005.001.052	521219	Rp 26.235.000	Rp 32.235.000	521131
	5252.005.001.052	522151	Rp 6.000.000		
	5252.994.001.002	523111	Rp 5.000.000	Rp 14.110.000	521841
		521111	Rp 4.000.000		
	524111	Rp 3.830.000			
	5252.970.001.052	521211	Rp 640.000		
5252.970.001.053	521211	Rp 640.000			
TOTAL			Rp 46.345.000	Rp 46.345.000	

Realisasi
Pendapatan
Rp 85.749.797

B.1 PENDAPATAN

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebesar **Rp 85.749.797** atau mencapai 1106,45 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp7.750.000. Pendapatan di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kep.Bangka Belitung berasal dari :

1. Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan Bangunan;
2. Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya;
3. Pendapatan Jasa Lainnya; dan
4. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu.

Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya dapat dilihat sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan TA 2020

Uraian	2020		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
PNBP			
Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	-	15.168.220	#DIV/0!
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	5.350.000	28.431.525	531,43
Pendapatan Jasa Lainnya	2.400.000	42.150.000	1.756,25
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	52	#DIV/0!
Jumlah	7.750.000	85.749.797	1.106,45

Realisasi Pendapatan TA 2020 mengalami kenaikan sebesar 251,58 % dibandingkan realisasi TA 2019.

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2020 dan 2019

URAIAN	REALISASI T.A. 2020	REALISASI T.A. 2019	NAIK (TURUN) %
PNBP	85.749.797	24.389.855	251,58
Jumlah	85.749.797	24.389.855	251,58

Realisasi

Belanja Negara

Rp54.811.514.457

B.2. BELANJA

Realisasi Belanja pada TA 2020 adalah sebesar Rp54.811.514.457 atau 98% dari anggaran belanja sebesar Rp55.753.849.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2020 tersaji sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja TA 2020

Uraian	2020		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	27.638.541.000	27.308.808.508	98,81
Belanja Barang	28.114.308.000	27.501.705.949	97,82
Belanja Modal	1.000.000	1.000.000	100,00
Total Belanja Kotor	55.753.849.000	54.811.514.457	98,31
Pengembalian Belanja	-	-	
Total Belanja	55.753.849.000	54.811.514.457	98,31

Realisasi Belanja TA 2020 mengalami penurunan sebesar 85,36% dibandingkan realisasi belanja pada TA 2019. Hal ini disebabkan antara lain :

Adanya kebijakan Pemerintah untuk melakukan Refocussing Anggaran untuk penanganan Pandemi Covid-19

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2020 dan 2019

URAIAN	REALISASI T.A. 2020	REALISASI T.A. 2019	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	27.308.808.508	26.923.922.802	1,43
Belanja Barang	27.501.705.949	25.083.679.728	9,64
Belanja Modal	1.000.000	28.000.000	(96,43)
Jumlah	54.811.514.457	52.035.602.530	(85,36)

Belanja

Pegawai

Rp27.308.808.508

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar **Rp27.308.808.508** dan **Rp26.923.922.802**. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan

yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Berdasarkan tabel perbandingan belanja pegawai, realisasi belanja TA 2020 mengalami kenaikan sebesar 1,43 persen dari realisasi belanja TA 2019.

Perbandingan Belanja Pegawai TA 2020 dan 2019

URAIAN	REALISASI TA 2020	REALISASI TA 2019	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	22.531.236.958	22.178.454.395	1,59
Belanja Uang Makan	4.660.566.301	4.660.517.000	0,00
Belanja Lembur	124.137.000	119.614.900	3,78
Jumlah Belanja Kotor	27.315.940.259	26.958.586.295	1,33
Pengembalian Belanja Pegawai	7.131.751	34.663.493	(79,43)
Jumlah Belanja	27.308.808.508	26.923.922.802	1,43

Belanja

Barang

Rp27.501.705.949

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang TA 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar **Rp 27.501.705.949** dan **Rp25.083.679/728**. Realisasi Belanja Barang TA 2020 mengalami kenaikan 9,64% dari Realisasi Belanja Barang TA 2019. Hal ini antara lain disebabkan oleh belanja dalam rangka penanganan Pandemi Covid-19.

Perbandingan Belanja Barang TA 2020 dan 2019

URAIAN	REALISASI TA 2020	REALISASI TA 2019	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	18.668.698.987	19.962.306.224	(6,48)
Belanja Barang Non Operasional	2.544.552.715	880.566.850	188,97
Belanja Persediaan	1.730.543.335	647.876.845	167,11
Belanja Jasa	1.381.299.321	997.375.027	38,49
Belanja Pemeliharaan	1.676.103.689	1.446.403.298	15,88
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	1.530.975.600	1.209.774.436	26,55
Jumlah Belanja Kotor	27.532.173.647	25.144.302.680	9,50
Pengembalian Belanja	30.467.698	60.622.952	
Jumlah Belanja	27.501.705.949	25.083.679.728	9,64

Berkaitan dengan alokasi Anggaran dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19, Satker pada Lingkup Kantor

Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung (Divisi Pemsyarakatan-05) mengalokasikan belanja barang untuk penanganan pandemi COVID-19 sebesar **Rp277.377.000**. Anggaran tersebut terserap sebesar **Rp247.754.200** dengan rincian sebagai berikut:

**Belanja Barang untuk Penanganan Pandemi Covid-19
Tahun Anggaran 2020**

AKUN	Uraian Akun	Pagu	Realisasi	Penyerapan %
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi	Rp 131.672.000	Rp 119.263.000	90,58
521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi	Rp 133.870.000	Rp 117.844.200	88,03
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	Rp 6.085.000	Rp 4.920.000	80,85
523114	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID-19	Rp 5.750.000	Rp 5.727.000	99,60
	JUMLAH	Rp 277.377.000	Rp 247.754.200	89,32

Belanja Modal **B.5 Belanja Modal**

Rp1.000.000

Realisasi Belanja Modal TA 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar **Rp1.000.000** dan **Rp28.000.000**. Realisasi Belanja Modal TA 2020 mengalami penurunan sebesar 96,43% dari Realisasi Belanja Barang TA 2019. Hal ini antara lain disebabkan adanya kebijakan Pemerintah untuk melakukan Refocussing Alokasi Anggaran untuk Penanganan Pandemi Covid-19.

Perbandingan Belanja Modal TA 2020 dan 2019

URAIAN	REALISASI TA 2020	REALISASI TA 2019	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.000.000	28.000.000	(96,43)
Jumlah Belanja	1.000.000	28.000.000	(96)

Berkaitan dengan alokasi Anggaran dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19, Satker pada Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung (Divisi Pemsyarakatan-05) mengalokasikan belanja

modal untuk penanganan pandemi COVID-19 sebesar **Rp1.000.000**. Anggaran tersebut terserap sebesar **Rp1.000.000** dengan rincian sebagai berikut:

**Belanja Modal untuk Penanganan Pandemi Covid-19
Tahun Anggaran 2020**

AKUN	Uraian Akun	Pagu	Realisasi	Penyerapan
532119	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan Pandemi Covid-19	1.000.000	1.000.000,00	100,00
	JUMLAH	1.000.000	1.000.000	100,00

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Persediaan

Rp524.732.249

C.1 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar **Rp524.732.249** dan **Rp1.081.294.983**. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan TA 2020 dan 2019

Persediaan	TH 2020	TH 2019
Barang Konsumsi	203.173.149	827.534.383
Amunisi	321.559.100	253.760.600
Jumlah	524.732.249	1.081.294.983

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Berkaitan dengan Persediaan dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19, terdapat Persediaan dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19 yang dibeli sendiri, serta dari transfer yang masih bersaldo. Persediaan tersebut dalam keadaan baik dan siap pakai pada tanggal 31 Desember 2020. Berikut ini daftar persediaan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 :

Rincian Persediaan dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19

No.	Nama Barang Persediaan	Jumlah Unit	Nilai Rupiah
1	Sepatu Boot	5	Rp 357.500
2	Cairan Disinfektan	125	Rp 10.312.500
3	Kacamata Google	48	Rp 2.328.000
4	Face Shield	48	Rp 792.000
5	Sepatu Boot	20	Rp 1.430.000
6	Sabun Cuci Tangan	100	Rp 1.650.000
7	Sarung Tangan	48	Rp 5.280.000
8	Penutup Kepala Sensi	20	Rp 775.000
9	Hand Sanitizer Dirigen 20	3	Rp 1.575.000
	JUMLAH	417	24.500.000

Tanah

Rp161.087.895.000

C.2 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah di lingkup Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kep.Bangka Belitung per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar **Rp161.087.895.000** dan **Rp155.671.598.000**.

Mutasi Aset Tetap Tanah adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2019	Rp 155.671.598.000
Mutasi tambah:	
Koreksi Kesalahan Input IP	Rp 5.416.297.000
Saldo per 31 Desember 2020	Rp 161.087.895.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2020	Rp -
Nilai Buku per 31 Desember 2020	Rp 161.087.895.000

Rincian Tanah terletak:

di Jl. Merdeka muntok, Jl.Ican saleh Pangkalpinang, Jl. Sungai Selan Pangkalpinang, Jl. Ahmad Yani Pangkalpinang, Jl.Tua Tunu Pangkalpinang, Jl.Bukit Semut SungaiLiat, Jl.Lintas Timur Pangkalpinang, Jl.Cerucuk Badau Tanjung Pandan.

Peralatan dan Mesin

Rp24.589.374.120

C.3 Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar **Rp24.589.374.120** dan **Rp23.414.924.000**.

Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2019	Rp 23.414.924.000
Mutasi tambah:	Rp 1.969.973.248
Pembelian	Rp 98.775.000
Transfer Masuk	Rp 1.851.522.080
Reklasifikasi Masuk	Rp 5.560.000
Koreksi Pencatatan Nilai	Rp 14.116.168
Mutasi kurang:	Rp 795.523.128
Koreksi Pencatatan	Rp 15.255.590
Penghentian aset dari penggunaan	Rp 699.152.203
Transfer Keluar	Rp 74.875.335
Reklasifikasi Keluar	Rp 6.240.000
Saldo per 31 Desember 2020	Rp 24.589.374.120
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2020	Rp 18.598.979.157
Nilai Buku per 31 Desember 2020	Rp 5.990.394.963

*Gedung dan
Bangunan
Rp73.534.953.071*

C.4 Gedung dan Bangunan

Saldo gedung dan bangunan per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah **Rp73.534.953.071** dan **Rp77.937.450.071**. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2019	Rp 77.937.450.071
Mutasi tambah:	Rp 2.251.680.081
Hibah	Rp 50.000.000
Koreksi tambah	Rp 2.201.680.081
Mutasi kurang:	Rp 6.654.177.081
Koreksi Pencatatan	Rp 6.654.177.081
Saldo per 31 Desember 2020	Rp 73.534.953.071
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2020	Rp 7.840.335.204
Nilai Buku per 31 Desember 2020	Rp 65.694.617.867

*Jalan, Irigasi
dan Jaringan
Rp57.134.000*

C.5 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah **Rp57.134.000** dan **Rp104.534.000**. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020	Rp 104.534.000
Mutasi tambah:	Rp 10.392.000
Koreksi tambah	Rp 10.392.000
Mutasi kurang:	Rp 57.792.000
Koreksi Kurang	Rp 57.792.000
Saldo per 31 Desember 2020	Rp 57.134.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2020	Rp 6.397.493
Nilai Buku per 31 Desember 2020	Rp 50.736.507

*Aset Tetap
Lainnya
Rp45.143.245*

C.6 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah **Rp45.143.245** dan **Rp45.143.245**. Aset tetap tersebut berupa Buku, Bahan Kartografi, Alat Musik, Pahatan. Mutasi transaksi terhadap Aset Tetap Lainnya per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2020	45.143.245
Mutasi tambah:	
Pembelian	-
Mutasi kurang:	
Koreksi pencatatan	-
Saldo per 31 Desember 2020	45.143.245
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Desember 2020	-
Nilai Buku per 31 Desember 2020	45.143.245

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Akumulasi
Penyusutan
Aset Tetap
Rp26.445.711.854*

C.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing Rp26.445.711.854 dan Rp22.007.055.700.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2020, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1	Gedung dan Bangunan	Rp 73.534.953.071	Rp 7.840.335.204	Rp 65.694.617.867
2	Tanah	Rp 161.087.895.000	Rp -	Rp 161.087.895.000
3	Irigasi	Rp 57.134.000	Rp 6.397.493	Rp 50.736.507
4	Peralatan dan Mesin	Rp 24.589.374.120	Rp 18.598.979.157	Rp 5.990.394.963
5	Aset Tetap Lainnya	Rp 45.143.245		
6	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	Rp 1.166.130.632	Rp 1.158.334.091	Rp 7.796.541
	Akumulasi Penyusutan	Rp 260.480.630.068	Rp 27.604.045.945	Rp 232.831.440.878

*Aset Lain-Lain
Rp1.166.130.632*

C.8 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah **Rp1.166.130.632** dan **Rp466.978.429**. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional lingkup Kanwil Kementerian Hukum dan HAM

Kep. Babel serta dalam proses penghapusan dari BMN. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2020	Rp 1.166.130.632
Mutasi tambah:	
- reklasifikasi dari aset tetap ke aset lainnya	Rp -
Mutasi kurang:	
- penggunaan kembali BMN yang dihentikan	Rp -
- penghapusan BMN	Rp -
Saldo per 31 Desember 2020	Rp 1.166.130.632
Akumulasi Penyusutan	Rp 1.158.334.091
Nilai Buku per 30 Desember 2020	Rp 7.796.541

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya Rp1.158.334.091

C.9 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar **Rp1.158.334.091** dan **Rp463.630.097**. Rincian akumulasi amortisasi dan penyusutan aset lainnya adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Amortisasi dan Penyusutan Aset Lainnya

Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
1.166.130.632	1.158.334.091	7.796.541
1.166.130.632	1.158.334.091	7.796.541

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Utang kepada Pihak Ketiga Rp351.766.949

C.10 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar **Rp351.766.949** dan **Rp454.090.183**. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 bulan.

Rincian Utang Pihak Ketiga Tahun Anggaran 2020

No	Kode Satker	Satker	Bama	Uang Makan	Jumlah Utang
1	683682	Lapas Narkotika Pangkalpinang	82.941.203	-	82.941.203
2	568712	Lapas Perempuan Pangkalpinang	581.500	-	581.500
3	406523	Rutan Kelas IIB Muntok	79.092	-	79.092
4	568712	Lapas Kelas IIB Sungailiat	247.324.900	-	247.324.900
5	406514	Lapas TanjungPandan	9.639.254	-	9.639.254
6	663090	RUPBASAN Pangkalpinang	-	11.201.000	11.201.000
Jumlah			340.565.949	11.201.000	351.766.949

Ekuitas

Rp233.049.549.423

C.11 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar **Rp233.049.549.423** dan **Rp235.797.146.748**. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

*Pendapatan
PNBP
Rp85.749.745*

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar **Rp85.749.745** dan **Rp23.116.729**. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak TA 2020 dan 2019

URAIAN	TH 2020	TH 2019	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya (425119)	Rp 15.168.220	Rp 2.642.885	473,93
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan (425131)	Rp 28.431.525	Rp 20.458.321	38,97
Pendapatan Jasa Lainnya (425699)	Rp 42.150.000	Rp -	#DIV/0!
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) (425764)	Rp -	Rp 15.523	(100,00)
Jumlah	85.749.745	23.116.729	270,94

Beban

Pegawai

Rp27.313.462.508

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada TA 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar **Rp27.313.462.508** dan **Rp26.930.469.802**. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai TA 2020 dan 2019

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2020	TH 2019	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji	17.946.814.440	17.785.670.020	0,9
Beban Pembulatan Gaji PNS	388.063	403.423	-3,8
Beban Tunjangan-Tunjangan	9.249.254.756	9.059.444.952	2,1
Beban Lembur	124.137.000	119.614.900	3,8
Pengembalian	7.131.751	34.663.493	-79,4
Jumlah	27.313.462.508	26.930.469.802	1,4

Beban

Persediaan

Rp3.021.852.997

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar **Rp3.021.852.997** dan **Rp1.152.044.678**. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan TA 2020 dan 2019

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2020	TH 2019	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	2.987.953.747	1.104.061.678	170,63
Beban Persediaan Amunisi	33.899.250	46.250.000	(26,70)
Beban Persediaan Lainnya	-	1.733.000	(100,00)
Jumlah Beban Persediaan	3.021.852.997	1.152.044.678	162,30

Beban Barang dan Jasa

Rp22.385.536.460

D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa TA 2020 dan TA 2019 adalah masing-masing sebesar **Rp22.385.536.460** dan **Rp21.676.950.117**. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas, serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2020 dan 2019

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2020	TH 2019	NAIK (TURUN) %
Beban Barang Operasional	18.558.721.753	19.828.371.997	-6,40
Beban Barang Non Operasional	2.463.443.715	880.566.850	179,76
Beban Langganan Daya dan Jasa	1.032.132.690	943.534.222	9,39
Beban Sewa	0	7.000.000	
Beban Jasa Profesi	349.481.000	78.100.000	347,48
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	4.920.000	0	#DIV/0!
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	5.155.000		
Pengembalian Beban Pengadaan Bahan Makan	22.686.598	58.342.952	-61,12
Pengembalian Beban Bahan	5.631.100	0	#DIV/0!
Pengembalian Beban Honor Operasional Satuan Kerja	0	2.280.000	-100,00
Jumlah	22.385.536.460	21.676.950.117	3,27

*Beban
Pemeliharaan
Rp1.627.499.689*

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan TA 2020 dan TA 2019 adalah masing-masing sebesar **Rp1.627.499.689** dan **Rp1.476.751.798**. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk TA 2020 dan TA 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan TA 2020 dan 2019

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2020	TH 2019	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.200.550.093	1.061.882.750	13,06
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	420.572.596	361.730.548	16,27
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	650.000	53.066.500	-98,78
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin - Penanganan Pandemi COVID-19	5.727.000	0	#DIV/0!
Jumlah	1.627.499.689	1.476.679.798	10,21

*Beban
Perjalanan
Dinas
Rp1.528.825.600*

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar **Rp1.528.825.600** dan **Rp1.209.774.436**. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2020 dan 2019

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2020	TH 2019	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	729.604.100	970.304.436	-24,81
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	672.488.000	239.470.000	180,82
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	128.883.500	0	#DIV/0!
Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.150.000	0	#DIV/0!
Jumlah	1.528.825.600	1.209.774.436	26,37

Beban

Penyusutan

dan Amortisasi

Rp5.546.589.300

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk TA 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar **Rp5.546.589.300** dan **Rp5.258.915.415**. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2020 dan 2019

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TH 2020	TH 2019	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	3.010.036.969	2.861.916.755	5,18
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	2.527.448.448	2.287.605.831	10,48
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan	4.788.342	5.752.916	-16,77
Beban Penyusutan Aset Tetap Yang tdk digunakan	4.315.541	1.066.666	304,58
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	5.546.589.300	5.156.342.168	7,57

D.8 Beban Dari Kegiatan Non Operasional

Jumlah Beban Dari Kegiatan Non Operasional untuk TA 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar **Rp3.633.322** dan **Rp57.077.435**.

Surplus dari

Kegiatan Non

Operasional

Rp38.801.230

D.9 Surplus Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional TA 2020 dan 2019

URAIAN	TH 2020	TH 2019	NAIK (TURUN) %
Surplus Penjualan Aset Non Lancar			
Pendapatan Pelepasan A.N.Lancar	0	0	#DIV/0!
Defisit Penjualan Aset Non Lancar			
Beban Pelepasan A.N.Lancar	0	0	#DIV/0!
Defisit Selisih Kurs			
Pendapatan dari Keg. Non.O .Lainnya	42.434.552	32.204.719	31,77
Beban dari Keg. Non.O .Lainnya	3.633.322	57.007.435	-93,63
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	38.801.230	(24.802.716)	-256,44

**) Pendapatan/Beban Penyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO)*

Beban Khusus Penanganan Pandemi COVID-19 Rp

D.10 Beban Penanganan Pandemi COVID-19

Dalam rangka mendukung kebijakan Pemerintah dalam rangka mengatasi dan mencegah penyebaran Pandemi COVID-19, Satker di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung melakukan realisasi belanja anggaran TA 2020 sehingga memunculkan beban khusus Penanganan Pandemi COVID-19 sebagai berikut:

No	Beban	Jumlah	Keterangan
1	Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	Rp 119.263.000	
2	Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	Rp 4.920.000	
3	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID-19	Rp 5.727.000	
		Rp 129.910.000	

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

<i>Ekuitas Awal</i> <i>Rp235.797.146.748</i>	E.1 Ekuitas Awal Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp235.797.146.748 dan Rp203.413.237.984 .
<i>Defisit LO</i> <i>Rp61.299.215.579</i>	E.2 Surplus (Defisit) LO Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2018 adalah defisit sebesar Rp61.299.215.579 dan Rp57.603.443.986 . Defisit LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.
<i>Koreksi Atas Reklasifikasi</i> <i>Rp5.560.000</i>	E.3.1 Koreksi Atas Reklasifikasi Koreksi atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp5.560.000 dan Rp(201.335.738) .
<i>Selisih Revaluasi Aset Tetap</i> <i>Rp3.830.407.919</i>	E.3.2 Selisih Revaluasi Aset Tetap Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp3.830.407.919 dan Rp30.509.377.000 .
<i>Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi</i> <i>Rp(2.260.255.399)</i>	E.3.3 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp(2.260.255.399) dan Rp3.668.638.845 . Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.
<i>Transaksi Antar Entitas</i> <i>Rp55.593.306.003</i>	E.5 Transaksi Antar Entitas Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp56.975.905.734 dan

Rp56.010.672.643. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN

Dalam rangka penanganan Pandemi COVID-19, terdapat transaksi Transfer Masuk dan Transfer Keluar di Satker yang berada dalam lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung. Transaksi tersebut dilakukan baik oleh antar satker di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, maupun dengan Satker di luar lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung. Adapun daftar rincian Transaksi Transfer Keluar dan Transfer Masuk di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung sampai dengan periode 31 Desember 2020 yaitu, sebagai berikut:

Daftar Transfer Masuk Dalam Rangka Penanganan Pandemi COVID-19

NO	KODE SATKER	SATKER PENERIMA	JENIS BARANG	JUMLAH	NILAI TRANSFER MASUK
1	352605	LPKA Pangkal Pinang, Provinsi Kep. Bangka Belitung	Alat Pelindung Diri	12	Rp 3.774.452
			Rapid Test	12	Rp 429.000
			Alat Penyemprot Disinfektan	2	Rp 1.470.000
2	406508	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PANGKALPINANG	FACE SHIELD	150 pcs	Rp 2.475.000
			Sepatu Boot	15 pcs	Rp 1.072.500
			Clinical Thermometer	1	Rp 3.000.000
3	406514	LEMBAGA PEMASYARAKATAN TANJUNG PANDAN	Cairan Disinfektan	125	Rp 10.312.500
			Kacamata Google	48	Rp 2.328.000
			Face Shield	48	Rp 792.000
			Sepatu Boot	20	Rp 1.430.000
			Sabun Cuci Tangan	100	Rp 1.650.000
			Sarung Tangan	48	Rp 5.280.000
			Penutup Kepala Sensi	20	Rp 775.000
			Alat Penyemprot Disinfektan	3	Rp 2.205.000
			Clinical Thermometer	1	Rp 3.000.000
4	406523	RUTAN KELAS IIB MUNTOK	Cairan Disinfektan	25	Rp 2.062.500
			Clinical Thermometer	1	Rp 3.000.000
5	418347	Lapas Perempuan Kelas III Pangkal Pinang	Clinical Thermometer	1	Rp 3.000.000
6	568712	LAPAS SUNGAI LIAT	APD,Rapid Test		Rp 18.547.616
			Clinical Thermometer	1	Rp 3.000.000
7	649003	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM	Clinical Thermometer	10	Rp 30.000.000
			Alat Pelindung Diri	200	Rp 400.000.000
			Masker	50	Rp 19.850.000
			Rapid Test	260	Rp 52.800.000
			Hand Sanitizer	50	Rp 3.162.500
			Vitamin B Kompleks	100	Rp 12.800.000
			Vitamin C	100	Rp 12.600.000
			Vitamin D	50	Rp 34.250.000
			Clinical Thermometer	1	Rp 3.000.000
8	653222	BALAI PEMASYARAKATAN PANGKAL PINANG	Clinical Thermometer	1	Rp 3.000.000
9	663090	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA PANGKAL PINANG	Clinical Thermometer	1	Rp 3.000.000
10	683682	LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA PANGKAL PINANG	Paket APD	6	Rp -
			Rapid Tes	8	Rp -
			Clinical Thermometer	1	Rp 3.000.000

**Daftar Transfer Keluar Dalam Rangka Penanganan
Pandemi COVID-19**

NO	KODE SATKER	SATKER PENGIRIM	JENIS BARANG	JUMLAH	NILAI TRANSFER KELUAR
1	649003	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM	Clinical Thermometer (Alat Kedokteran Umum)	1	Rp 3.000.000
				1	Rp 3.000.000
				1	Rp 3.000.000
				1	Rp 3.000.000
				1	Rp 3.000.000
				1	Rp 3.000.000
				1	Rp 3.000.000
				1	Rp 3.000.000
				1	Rp 3.000.000
				1	Rp 3.000.000
TOTAL				10	Rp 30.000.000

Ekuitas Akhir **E.7 Ekuitas Akhir**

Rp233.049.549.423

Nilai ekuitas akhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar **Rp233.049.549.423** dan **Rp235.797.146.748**

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

**F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH
TANGGAL NERACA**

Tidak Terdapat Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca.



Pangkalpinang, 29 Januari 2021
Kepala Kantor Wilayah

Anas Saepul Anwar
Anas Saepul Anwar
NIP 196202191986031 002